

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 – 20 September 2018 di bidang Pemerintahan khususnya pada bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka dapat disimpulkan:

1. Calon Apoteker mampu memahami tujuan, fungsi, tugas dan wewenang pada bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Calon Apoteker juga dapat memahami program yang ada antara lain Farmakoekonomi dan Penggunaan Obat Rasional, Ketenagaan dan Pelayanan Masyarakat, Obat Publik, NAPZA, Alat Kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional dan Kosmetik.
2. Kunjungan ke Gudang Farmasi Kota Pasuruan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon Apoteker tentang perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pendistribusian sediaan farmasi di lingkup Kota Pasuruan.
3. Kunjungan yang dilakukan ke Puskesmas Bugul Kidul Kota Pasuruan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan obat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pelaporan penggunaan sediaan farmasi. Calon Apoteker juga dapat memahami program Puskesmas dan kegiatan pelayanan kefarmasian tingkat dasar.

5.2. Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 17– 20 September 2018 di bidang Pemerintahan khususnya pada bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka hal yang dapat disarankan adalah:

1. Bagi Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.

Bila memungkinkan adanya tambahan waktu untuk melakukan kunjungan singkat yaitu mengamati kegiatan seksi perbekalan farmasi dan alat kesehatan sehari-hari, dalam mengelola perbekalan farmasi serta bagaimana peran Apoteker dalam memastikan obat dan alat kesehatan sudah sesuai kebutuhan. Dengan adanya kunjungan singkat tersebut calon Apoteker dapat melihat kenyataan dilapangan sehingga dapat memiliki gambaran kegiatan bagian perbekalan farmasi dan alat kesehatan terlepas dari teori yang diperoleh.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan lebih konsentrasi dan lebih aktif dalam menggali informasi selama proses Praktek Kerja Profesi Apoteker di seksi Faralkes berlangsung sehingga bisa memperoleh banyak pengetahuan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Cara Distribusi Obat yang Baik*, Jakarta : Badan POM RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1991, Keputusan Dirjen POM No. 02240/ B / SK / VII/ 1991 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176 / MENKES / PER / VIII Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika, Departemen Kesehatan Indonesia, Jakarta.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018, Visi dan Misi, Diakses pada 17 September 2018, <http://dinkes.jatimprov.go.id>.
- Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Departemen Kesehatan Indonesia, 2007, *Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah Perbatasan*, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Departemen Kesehatan Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha OT, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Regristasi Obat Tradisional yang diedarkan di Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2012, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK 00.05.4.1745 Tahun 2017 tentang Kosmetik.
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2016, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan, Pasuruan.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2016 Pasal 45 tentang Upaya Kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2016, Peraturan Gubernur Provinsi. Jawa Timur No 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK. 03.1.2.3.04.12. 2206 tahun 2012 tentang Tata Cara Produksi Pangan yang Baik.